
ADVOKASI THE GAMBIA COMMITTEE ON TRADITIONAL PRACTICES AFFECTING THE HEALTH OF WOMAN AND CHILDREN (GAMCOTRAP) DALAM MASALAH FEMALE GENITAL MUTILATION DI GAMBIA

Regita Prameswari¹

International Relations Department

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bantul, DIY, 55183

Egik221226@gmail.com

Submitted:

Accepted:

Abstract

This paper explain about the efforts and obstacles experienced by GAMCOTRAP to eradicate the practice of Female Genital Mutilation in Gambia. Where this practices is considered to be very detrimental in terms of women's health and safety as well as violating human rights. By using their advocacy strategies namely symbolic politics, leverage politics and also using local-self reliance is considered effective in stopping FGM practices in Gambia until finally in 2015 Female Genital Mutilation officially has been banned until now.

Keywords: FGM, Gambia, GAMCOTRAP, Advocacy

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai usaha dan hambatan yang dialami oleh GAMCOTRAP untuk menghapuskan praktik FGM di Gambia, dimana praktik ini dinilai sangat merugikan dari segi kesehatan dan keselamatan wanita, juga melanggar HAM. Dengan menggunakan strategi advokasi yang mereka lakukan yaitu *symbolic politics* dan *leverage politics* ada juga menggunakan *self-local reliance* yang dinilai efektif untuk menghentikan praktik FGM di Gambia. Hingga akhirnya pada tahun 2015 FGM resmi untuk dilarang dilakukan di Gambia hingga saat ini.

Kata Kunci: FGM, Gambia, GAMCOTRAP, Advokasi

INTRODUCTION

Perempuan dalam kehidupan sehari-harinya menempati status yang lebih rendah daripada laki-laki, apalagi dengan peran perempuan dan norma gender yang dipandu oleh prinsip dominasi laki-laki. Sehingga interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan selalu ditentukan oleh pola patriarki yang kuat yang ada di berbagai kelompok etnis, sehingga secara umum diterima oleh mayoritas laki-laki dan perempuan lebih rendah daripada laki-laki (United Nations, 2003). Dalam tulisan Yeni Handayani yang berjudul “Perempuan dan Hak Asasi Manusia”, ia berpendapat bahwa perempuan juga sering menjadi korban paling banyak untuk pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa dan sebagainya (Handayani, 2016). Termasuk di dalamnya hal praktik tradisional, jika perempuan terlibat dalam praktik tradisional yang sekiranya dapat menyakiti mereka dalam hal fisik ataupun psikis termasuk didalamnya adalah *Female Genital Mutilation (FGM)*, *Marriage by Abduction*, *Child Marriages & Virginity Testing* yang termasuk dalam pelanggaran hak terhadap wanita (Wadesango, Rembe, & Chabaya, 2011). Dalam tulisan Lalit Kishore yang berjudul “*Harmful practice of female genital mutilation is a global concern: UNICEF*” yang dimuat di *Merinews*, pada sebuah kesempatan perayaan *Zero Tolerance to Female Genital Mutilation* pada 6 Februari 2016, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Geeta Rao Gupta menyampaikan :

"Female genital mutilation differs across regions and cultures, with some forms involving life-threatening health risks. In every case FGM violates the rights of girls and women. We must all accelerate efforts - governments, health professionals, community leaders, parents and families – to eliminate the practice," (Kishore, 2016)

Terlebih lagi dalam praktik FGM yang terjadi di banyak negara di dunia, terutama di wilayah Benua Afrika dan Timur tengah serta terjadi di Asia, Australia, Amerika latin, New Zealand, Amerika Utara dan Eropa Barat (Equality Now, 2016).

Female Genital Mutilation terjadi karena hal ini dianggap termasuk dalam kebudayaan campuran, keagamaan dan faktor sosial seperti keluarga dan masyarakat (Equality Now, 2016). Praktik ini didukung juga oleh keyakinan, nilai dan sikap tradisional, di beberapa kelompok masyarakat hal ini juga dianggap sebagai ritual menuju kedewasaan, lainnya menilai bahwa FGM dilakukan dengan alasan agama, tetapi tidak terbatas pada budaya atau agama tertentu, FGM juga merupakan prasyarat untuk menikah, yang merupakan

hal vital bagi kelangsungan hidup sosial dan ekonomi seorang wanita (FGM National Group, 2015). Selain dari faktor tersebut adapun faktor lainnya yang menyebabkan adanya FGM ini adalah ketimpangan gender yang menjadi penyebab atas penghilangan hak-hak perempuan dan sering kali perempuan juga tidak memiliki hak atas apapun, baik harta ataupun benda, kebebasan menentukan masa depan, bahkan kontrol atas diri, seksualitas dan tubuhnya sendiri (Marlinda Oktavia, 2012). Kemudian, hal ini disangkut pautkan dengan ide budaya dari feminisme dan keindahan, dimana ada penanaman nilai bahwa wanita dapat dikatakan sebagai wanita yang bersih dan indah, ketika bagian yang dianggap kotor oleh laki-laki kemudian dihilangkan. FGM seringkali di dasari oleh kepercayaan bahwa FGM dianggap sebagai perilaku seksual yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai standar untuk keprawanan pranikah dan kesetiaan perkawinan serta hal ini dapat digunakan untuk mengurangi libido wanita (Equality Now, 2016).

Konsekuensi sosial yang diterima oleh perempuan yang menjadi korban FGM adalah posisi yang serba salah dalam kehidupan sosial mereka, disatu sisi jika mereka tidak melakukan FGM maka mereka akan mendapatkan perlakuan sosial yang tidak mengenakan seperti susahny si anak gadis untuk mencari suami, rasa malu, stigmatisasi, serta hilangnya posisi sosial, kehormatan dan perlindungan, mengakibatkan pengucilan sosial keluarga di masyarakat, serta mempengaruhi hubungan mereka dengan pasangan, anak-anak dan kerabat mereka di negara asal mereka. Namun sebaliknya, jika mereka melakukan FGM tersebut maka mereka akan mendapatkan pengakuan oleh masyarakat dan perempuan memiliki kekuatan di urusan mereka sehari-hari ataupun dalam rumah tangga, karena FGM ini menjadi identitas dari individu ataupun kelompok dan merupakan suatu kebanggaan (Berg, Denison, & Fretheim, 2010).

Negara dengan presentase tertinggi untuk terjadinya FGM banyak berasal dari Benua Afrika dan Timur Tengah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa FGM juga terjadi di Asia, Australia, Amerika Latin, New Zealand, Amerika Timur dan Eropa barat. Khusus di daerah Asia dan Eropa para orang tua biasanya akan membawa anak perempuan mereka ke kampung halaman mereka guna menjalankan FGM disana, kemudian hal ini dikenal dengan sebutan "*Vacation Cutting*" (CPIN, 2016).

Menurut data *World Health Organization* (WHO) setidaknya ada kurang lebih 90 juta wanita di Afrika yang mengalami FGM dan serta 3 juta lainnya mengalami prosedur tersebut setiap tahunnya. Dalam setiap negara bagian di Afrika ada perbedaan tentang tipe prosedur

dan kelaziman atas praktik ini dikemukakan oleh Ngianga – Kandala di tahun 2009. Pada jangka waktu 2010-2015 masih ada lebih dari 54% kasus FGM yang menimpa perempuan dari umur 15-49 tahun (Odukogbe, Afolabi, Bello, & Adeyanju, 2017). Hal ini juga dapat meningkat seiring waktunya.

Gambia sebagai salah satu negara yang terletak di Benua Afrika Barat atau lebih tepatnya berada di wilayah Senegal dengan luas wilayah 11.295 km² dengan populasi 1.928.930 dengan umur rata-rata penduduknya adalah 20 tahun serta tingkat pertumbuhan sebesar 2.23% pada tahun 2014 membuatnya menjadi negara terkecil di Benua Afrika Barat (BBC, 2018). Di Gambia sendiri masih terjadi sekitar 25% kasus FGM dari total data WHO pada tahun 1985 yang terjadi sebesar 80% kasus membuatnya menjadi salah satu penyandang negara dengan persentase kasus FGM terbesar. FGM yang di legalkan dan juga tingkat pelegehan berbeda di tujukan untuk etnis tertentu (Inter-Parliamentary Union, 2017), pada tahun 2004-2015 ada sekitar 75% kasus FGM yang terjadi terhadap perempuan dengan rentang usia sekitar 15-49 tahun, sementara pada tahun 2010-2015 ada 56% FGM yang terjadi menimpa perempuan yang masih terhitung masih sangat belia sekitar usia 0-14 tahun (Odukogbe, Afolabi, Bello, & Adeyanju, 2017). Tingkat FGM di Gambia akan berbeda sesuai dengan kelompok etnis yang ada di Gambia, menurut catatan *Obstetrics and Gynecology International* pada tahun 2013 : Madinka/Jahanka 96.7%, Wolof 12.4%, Djola/Karoninka 87.0%, Fula/Tukolor/Lorobo 87.3%, Serer 43.0%, Serahule 97.8% (Kaplan, et al., 2013).

Dengan adanya kejadian tersebut maka pemerintahan Gambia dibawah kepemimpinan Yahya Jammeh mulai menggerakkan NGO lokal yang bernama GAMCOTRAP sebagai advokator dibawah dukungan UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund). *GAMCOTRAP (the Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children)* sendiri merupakan *Non-Governmental Organization (NGO)* yang didirikan pada tahun 1984 setelah konferensi Regional yang diselenggarakan di Dakar–Senegal yang diselenggarakan oleh *World Health Organization (WHO)* guna membahas isu-isu yang menyangkut praktik-praktik tradisional berbahaya yang mempengaruhi kesehatan serta reproduksi perempuan di Afrika. Namun pada tahun 1992 akhirnya GAMCOTRAP menjadi NGO yang independen (28 Too Many, 2015).

METHODS OF RESEARCH

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta yang telah ada dengan didukung oleh fakta-fakta sebelumnya, kemudian ditariklah suatu kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Dimana data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, situs-situs internet, surat kabar, laporan, berita *online*, dokumen perjanjian internasional serta sumber-sumber lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

THEORETICAL FRAMEWORK

Untuk membantu memahami dan mengetahui tentang peran GAMCOTRAP dalam menangani permasalahan *Female Genital Mutilation* di Gambia, maka kerangka dasar berpikir yang akan di gunakan adalah *Transnational Advocacy Network* dan *Non-Governmental Organization (NGO)*.

1. Konsep *Transnational Advocacy Network*

Politik dunia yang mulai berkembang di akhir abad ke-20an, sejalan dengan negara, banyak aktor non-negara yang berinteraksi satu sama lain, dengan negara dan dengan organisasi internasional. Dalam artikel yang ditulis oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, jaringan advokasi bersifat transnasional, regional dan nasional dapat menjadi kunci kontribusi dari konvergensi norma sosial dan budaya yang dapat mendukung proses integrasi regional dan internasional. Dengan membangun jaringan baru diantara aktor-aktor di masyarakat, negara-negara dan organisasi internasional, mereka melipat gandakan kesempatan untuk dialog dan bertukar. Dalam ranah isu seperti lingkungan dan HAM, mereka juga membuat ketersediaan sumber internasional untuk aktor-aktor baru di politik domestik dan perjuangan sosial. Dengan demikian menyamakan batasan antara hubungan yang dimiliki negara dengan warga negaranya dan jalannya warga negara dan negara bagian memiliki sistem internasional, jaringan advokasi membantu untuk mengubah praktik dari kedaulatan warga negara (Keck & Sikkink, 1999).

Para aktor jaringan transnasional juga bekerja untuk sebuah isu yang melibatkan nilai, wacana dan informasi yang sama. Mereka mampu menggerakkan informasi dengan tepat dan cermat agar menjadi isu di kategori baru dan mendapat perhatian masyarakat sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena jaringan

transnasional sesungguhnya adalah sebuah struktur yang komunikatif, maka aktor-aktornya akan membawa ide, norma dan wacana dalam debat pembentukan kebijakan. Jejaring transnasional juga berperan sebagai penghubung negosiasi budaya dan sosial yang kemudian menjadi dasar dari proses integrasi regional. Jejaring advokasi kemudian mengambil konsep dari sosiologi dimana mereka kemudian akan menjembatani kesenjangan yang ada antara hubungan internasional dan politik komparatif.

Dalam *Transnational Advocacy Networks* ada 4 taktik yang dapat dilakukan seperti :

- a. *Information Politics* atau kemampuan untuk menggerakkan informasi politis yang dapat digunakan dengan cepat dan terpercaya ke tempat yang dinilai dapat memiliki impact yang paling besar.
- b. *Symbolic Politics* atau kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi dan cerita yang masuk akal terhadap suatu situasi dan untuk mengklaim audiens yang biasanya berjarak lebih jauh.
- c. *Leverage Politics* atau kemampuan untuk menggunakan aktor-aktor yang kuat dan berkuasa untuk mempengaruhi situasi dimana anggota jaringan yang lemah untuk memiliki pengaruh.
- d. *Accountability Politics* atau suatu usaha untuk mewajibkan aktor-aktor yang berkuasa dan kuat untuk bertindak menyamakan prinsip-prinsip yang biasanya mereka dukung (Keck & Sikkink, 1999).

2. Konsep *Non-Governmental Organization (NGO)*

Dizaman seperti sekarang, aktor yang berperan dalam hubungan internasional tidak hanya negara namun *Multi-National Corporation (MNC)*, *Non-Governmental Organization (NGO)*, bahkan individu juga bisa dibilang sebagai aktor hubungan internasional karena mobilitas mereka sudah tidak terbatas hanya di dalam negara namun juga bisa lintas negara. NGO adalah badan non-pemerintahan yang bekerja tanpa mencari keuntungan, dan ia dapat berdiri sendiri tanpa perlu bantuan pemerintah atau sektor lainnya. Tugas dari NGO adalah untuk menggalakkan kepentingan publik dan melayani kepentingan publik daripada mencari keuntungan. Kemandirian mereka

membuat mereka bisa memonitor kinerja pemerintah dan dapat mengadvokasi untuk kemajuan (Mosaica, 2012).

David Korten menspesifikan mengenai perkembangan LSM ke dalam 4 generasi berdasarkan strategi yang dipilihnya. *Pertama*, LSM mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat, pilihan ini memfokuskan advokasinya untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat. *Kedua*, memusatkan perhatiannya agar LSM dapat mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. *Ketiga*, permasalahan lokal yang tidak bisa dipisahkan dari permasalahan regional hingga regional, maka fokus NGO ini adalah untuk pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, LSM yang disebut sebagai generasi *people movement* untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik (As'ad, 2014).

NGO pembangunan adalah NGO yang lebih berfokus untuk mengadakan program-program pembangunan di tengah masyarakat secara konvensional, terutama di bidang pertanian, peternakan dan kesehatan. Sedangkan NGO mobilisasi lebih berfokus pada mobilisasi rakyat miskin terkait isu-isu yang sedang sering terjadi seperti isu lingkungan, status kaum perempuan, hak-hak hukum dalam status kepemilikan tanah, serta orang yang tidak memiliki tempat tinggal (Fakih, 1991).

Menurut David Korten strategi NGO pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ;

1. *Relief and welfare*

Generasi pertama dari strategi NGO ini berfokus pada bentuk bantuan langsung yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh dunia karena biasanya masalah yang dihadapi adalah kekurangan bahan pokok dan jasa yang memiliki ruang lingkup individu atau keluarga dengan jangka waktu pelaksanaannya secepat mungkin. Aktor utama dari strategi ini adalah NGO. Fokus dari NGO ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak melalui tindakan distribusi makanan, tim kesehatan, dan penyediaan tempat penampungan dan semua didanai oleh kontribusi swasta (Korten D. , 1987).

2. *Local-self-reliance*

Karena menyadari adanya keterbatasan dari pendekatan sebelumnya, pada akhir tahun 1970-an banyak NGO yang mulai melakukan proyek-proyek dengan gaya pengembangan masyarakat seperti halnya kesehatan preventif, praktik pertanian yang meningkat, infrastruktur lokal dan kegiatan pengembangan masyarakat (Sommer, 1977). Yang membedakan upaya ini dari pendekatan sebelumnya adalah upaya ini lebih mengartikan bantuan ini dalam bentuk pengembangan lokal mandiri dalam skala kecil karena masalah yang dihadapi adalah kelemahan lokal dengan pelaksanaan dalam jangka waktu seumur hidup dengan ruang lingkup yang mencakup daerah sekitar ataupun desa. Aktor utama dari generasi kedua ini adalah NGO dan organisasi penerima bantuan dan kemudian berkembang menjadi inisiatif swadaya masyarakat yang menejemennya lebih berorientasi pada pengelolaan pembangunan (Korten D. , 1987).

3. *Sustainable systems development*

Strategi dari generasi ketiga ini lebih mengartikan bantuan dalam bentuk pembangunan dengan sistem berkelanjutan karena masalah yang dihadapi adalah tentang kendala kelembagaan dan kebijakan yang mencakup suatu wilayah atau negara, aktor utama dari strategi ini adalah semua lembaga publik atau swasta yang menentukan sistem yang relevan kemudian pengembangan dari pengetahuan ini adalah kegagalan di sistem saling ketergantungan. Orientasi dari pengelolaan ini adalah pengelolaan strategi (Korten D. , 1987).

RESULT AND ANALYSES

UPAYA DAN HAMBATAN DALAM ADVOKASI MASALAH FGM DI GAMBIA

A. Upaya NGO di Gambia Untuk Menghapuskan FGM

Upaya yang dilakukan tidak hanya datang dari NGO lokal yang ada di Gambia, namun juga berasal dari NGO Internasional yang terjun langsung atau melaksanakan program yang berkolaborasi dengan NGO lokal guna memperlancar proses advokasi yang dilakukan

oleh NGO karena adanya rasa percaya yang tertanam oleh masyarakat terhadap NGO lokal yang memang sedari awal telah membantu mereka untuk menyelesaikan masalah FGM yang ada di Gambia, sehingga dengan digandengnya NGO lokal oleh NGO Internasional ini tidak hanya menarik minat masyarakat terhadap program-program yang kelak akan di luncurkan oleh NGO tersebut namun juga membantu NGO lokal tersebut dengan penyediaan fasilitas. Karena umumnya NGO lokal sangat memiliki keterbatasan terhadap ketersediaan fasilitas untuk melaksanakan program-program mereka.

Upaya yang datang dari dunia internasional telah di mulai padapertengahan tahun 1980an, NGO lebih di dorong untuk dapat meningkatkan sensitifitas masyarakat terhadap program yang mereka jalankan dan diawasi dengan seksama. Namun, pada tahun 2010 Agensi Hubungan NGO dipindahkan ke kantor kepresidenan yang membuat semua NGO harus mematuhi standar pertumbuhan pemerintahan yang akhirnya malah membatasi aktivitas mereka dan keberhati-hatian NGO dalam mempublikasikan kinerja mereka. Dengan banyaknya NGO lokal dan internasional yang bekerja di ranah FGM baik yang memiliki asosiasi secara langsung maupun tidak, ada beberapa NGO yang memiliki mandat khusus untuk menangani masalah FGM di Gambia seperti *Association for Promoting Girls' and Women's Advancement* (APGWA), BAFROW, GAMCOTRAP, Tostan dan Wassu Gambia Kafo serta *ActionAid* dan *Activista and Future In Our Hand* (FIOH) kemudian UNICEF dan UNFPA menyokong pendanaan yang secara khusus di berikan melalui program bersama (28 Too Many, 2015).

Dikarenakan usaha NGO dalam melakukan kampanye anti FGM ditangani oleh jaringan NGO yang lemah dengan akuntabilitas yang rendah serta keterbatasannya dalam keterlibatan kepolitikan maka *Women's Bureau and Ministry of Women's Affairs* telah mengembangkan rencana nasional untuk mengakselerasi ketidak perdulian terhadap FGM sebagai usaha untuk mengkoordinasi para aktivis dari rekan kerja pertumbuhan untuk melindungi hak dari perempuan, usaha ini juga didukung oleh UNICEF dan UNFPA dengan mengadakan program bersama termasuk sebagai target untuk melampaui legalisasi terhadap FGM (Women's Bureau/UNDP, 2014).

B. Pendekatan-Pendekatan yang dilakukan oleh NGO di Gambia

1. Health Risk/Harmful Traditional Practice (HTP) Approach

Adalah pendekatan yang menekankan dampak kesehatan yang akan dialami oleh korban FGM. Penggunaan strategi ini akan menghadapi banyak tantangan dikarenakan hal ini dilihat sebagai norma yang berlaku di masyarakat (Winterbottom, Koomen, & Burford, 2009).

2. Addressing The Health Complications of FGM

Pendekatan ini lebih diarahkan ke penelitian dan kompilasi kesehatan serta pelatihan untuk tenaga medis dan murid dari pendidikan kesehatan untuk melakukan sunat kepada anak-anak dengan sedikit ritual (UNICEF, 2005).

3. Educating Traditional Excisors and Offering Alternative Income

Dikarenakan masih eratnya keterkaitan mengenai FGM sebagai budaya di masyarakat Gambia, mereka yang terlibat dalam hal ini dianggap yang memiliki kedudukan, baik itu si pelaksana ataupun yang melaksanakan hal ini. FGM juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada para tetua dan penghubung antar wanita di dalam komunitas (28 Too Many, 2015). Selain dari faktor diatas, pemasukan terbesar mereka berasal dari bekerja sebagai pelaksana sunat dan umumnya lebih tinggi daripada mereka bekerja sebagai perawat ataupun tenaga kesehatan selain mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka juga dapat meningkatkan status sosial melalui pekerjaan sebagai pelaksana sunat sehingga praktik ini terus berlanjut (Office of the Senior Coordinator for International Women's Issue, 2001)

GAMCOTRAP telah mengatur pelatihan dan program-program lainnya termasuk penayangan video untuk menyediakan informasi dan efek yang menyakit dari praktik ini. Secara tidak langsung ini merupakan kampanye guna menghapuskan praktik ini terhadap perempuan, pemimpin komunitas, pemuda/i dan anak-anak. Mereka juga telah melaksanakan program-program tentang bahayanya praktik untuk dukun bersalin tradisional yang ada di beberapa desa. Pelatihan yang diadakan selama seminggu setidaknya telah berhasil merangkul 5.000 perempuan. Seminar yang

diadakan di seluruh negeri ditujukan agar dapat menjangkau seluruh penduduk agar subjek yang dulunya dianggap tabu dapat dibahas secara terbuka oleh masyarakat dan juga GAMCOTRAP berusaha menjangkau kalangan anak-anak dengan penggunaan materi audio-visual dan teater di sekolah mereka (Office of the Senior Coordinator for International Women's Issue, 2001)

4. *Alternative Rites of Passage (ARP)*

Pendekatan ini diperuntukkan untuk para grup etnis dimana FGM dijadikan patokan utama perempuan untuk dapat dikatakan dewasa, *Alternative Rites of Passage (ARPs)* yaitu sebagai ritual pengganti yang tetap menggunakan tradisi budaya namun menghilangkan penyunatannya.

Namun kesuksesan dari ARPs ini tergantung dari tingkat FGM yang di praktikkan di daerah tersebut, jika tidak maka ARPs akan memiliki dampak yang terbatas sehingga tidak berguna dan ARPs ini di dampingi oleh pendidikan yang mengkaitkan keseluruhan masyarakat yang kemudian akan mengarahkannya ke perubahan.

5. *Religious-Oriented Approach*

Dikarenakan mayoritas penduduk di Gambia adalah pemeluk Agama Islam sehingga sebagian besar dari mereka menganggap bahwa FGM merupakan “kewajiban agama” dalam Islam maka keterlibatan para pemimpin agama dan cendikiawan ini dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai perubahan dan diperuntukkan sebagai penafsir dan menjelaskan tentang sunat perempuan dalam Hadits, agar mereka dapat memberikan penjelasan ke masyarakat bahwa FGM tidak terkait dengan Islam (National Women’s Bureau Office of the Vice President, 2002)

6. *Legal Approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan NGO melakukan *lobby* ke pemerintahan guna menetapkan legalitas dari hukum yang melawan adanya FGM serta mengadvokasi itu ke efektifan pemaksaan dari legalitas semacam itu. Hal ini dilakukan oleh GAMCOTRAP dan *the Child Protection Alliance (CPA)* untuk melobby pemerintah terkait dengan legalitas yang melawan FGM serta yang melibatkan hukum terhadap anak seperti *Children’s Act* (2005). FLAG juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran akan adanya kerangka kerja yang melindungi hak-hak wanita dan terlibat

dalam perumusan rancangan peraturan terkait FGM di Parlemen (28 Too Many, 2015).

7. Rights Approach/ 'Community Conversations'/ Intergenerational Dialogue

Pendekatan ini digunakan bersamaan dengan pendekatan lainnya dan pendekatan ini didasarkan pada Teori Pengabaian Sosial oleh FGM yang berasal dari teori perubahan sosial dibalik ritual mengikat kaki di China (Mackie, 1996). Komponen dari teori ini termasuk :

- Pendekatan yang tidak menghakimi Hak Asasi Manusia
- Peningkatan kesadaran komunitas terhadap praktik yang menyakitkan
- Keputusan untuk meninggalkan FGM adalah keputusan bersama oleh komunitas
- Persyaratan dari komunitas publik atas afirmasi tentang pengabaian
- Difusi keputusan antar komunitas
- Lingkungan yang mendukung adanya perubahan termasuk komitmen dari Pemerintah (Wilson, 2013).

8. Promotion of Girls' Education to Oppose FGM

Pendidikan menjadi strategi jangka panjang yang sangat efektif untuk melawan FGM banyak NGO yang menggaet sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran atas hak-hak anak-anak dan bahaya dari FGM mereka juga mempunyai program sekolah yang meningkatkan kesadaran atas hak-hak perempuan (28 Too Many, 2015).

9. Media and Communication

Dikarenakan adanya pembatasan atas kebebasan untuk media beberapa NGO menggunakan jaringan media untuk melakukan promosi atas kegiatan anti-FGM. Penggunaan media tradisional seperti griots sangat dipahami kepentingan dan kegunaannya bagi beberapa NGO (28 Too Many, 2015).

10. Working With Men and Boys

Banyak NGO di Gambia yang mengerti bahwa perubahan sosial dan tradisi harus melibatkan semua kalangan dari masyarakat yang tidak hanya melibatkan perempuan dan wanita, namun juga laki-laki (28 Too Many, 2015).

C. Hambatan yang Dihadapi Oleh NGO

Hal yang menjadi tantangan terbesar oleh NGO datang dari pandangan masyarakat tentang FGM itu sendiri, yang dapat datang dari berbagai sudut pandang penting seperti pendidikan, agama dan media yang dapat diakses oleh masyarakat.

1. Pendidikan

Sekolah sekunder bebas biaya bagi anak laki-laki dan perempuan belum terwujud setelah dijanjikan oleh pemerintah pada tahun 2014 dan pada tahun 2020 pemerintah menargetkan untuk membebaskan biaya pendidikan di segala tingkat pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki (Jallow, 2014). Ada beberapa sektor swasta yang menawarkan pelatihan pasca sekolah menengah dikarenakan sekolah masih dianggap sebagai hal yang sangat sulit bagi banyak keluarga.

Selain melalui pendidikan formal, anak-anak di Gambia juga menerima pendidikan non-formal berupa Madrasah atau sekolah arab yang mengajarkan tentang agama islam. Bagi sebagian orang, madrasah menjadi peran penting bagi pembentukan moral dan perkembangan spiritual anak-anak, dan sistem pendidikan formal dilihat sebagai '*an instrument of cultural domination*' (UNESCO, t.thn.). Kesempatan belajar bagi perempuan telah di pelopori oleh madrasah-madrasah dikarenakan adanya tradisi dominasi oleh laki-laki, kesekretariatan Umum untuk Pendidikan Islam/Arab telah mengadvokasi untuk keterlibatan perempuan dalam dunia pendidikan (Women's Bureau/UNDP, 2014).

GAMCOTRAP bekerjasama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Lanjutan sejak tahun 2011 telah berusaha melibatkan FGM kedalam kurikulum pendidikan dan memperkenalkan pengajaran FGM sebagai salah satu komponen kemampuan dalam silabus resmi. Pelatihan diadakan untuk guru-guru pada tahun 2011 untuk mendiskusikan masalah yang memungkinkan dari FGM dan bertujuan untuk memasukkannya kedalam silabus.

2. Agama

Pendapat yang ada di kalangan ulama islam sangat beragam dan kemudian terbagi menjadi beberapa ada yang berpendapat bahwa wahyu yang ada di Qur'an mengindikasikan bahwa FGM tidak dilarang sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak dianjurkan dan bukan kewajiban agama. Pentingnya menggaet pemimpin agama yang dikenal merupakan bentuk prioritas utama dari usaha negara dalam menyampaikan masalah FGM. Dalam Forum Internasional yang diselenggarakan di Gambia pada Mei 2009, acara ini didukung oleh Imam Besar dari Mesjid Banjul. Acara ini menuntun ke penandatanganan Deklarasi Brufut tentang kinerja pengabaian FGM yang menyatakan "*Religion is often misrepresented to sustain(...) FGM/C and urges 'informed religious scholars be engaged in tye movement to end FGM/C'*" (28 Too Many, 2015)

Sejak 2009, forum telah mengatur untuk melakukan dialog untuk berdiskusi antar organisasi, Kementrian dan majelis islam besar. Kemudian pada tahun 2011, konferensi ulama islam dari afrika barat yang diselenggarakan di mauritania untuk mendiskusikan praktik yang menyakiti wanita. Ulama islam saat ini setuju bahwa prinsip islam yang pada dasarnya 'tidak melakukan kekerasan' menggantikan semuanya. Walaupun sudah ada fatwa yang melarang tindakan ini secara syaria dan ada 2 ulama Gambia yang menghadiri konferensi yang mendukung fatwa tersebut namun majelis besar Islam di gambia masih belum menyampaikan bahwasanya FGM tidak berkaitan dengan Islam (28 Too Many, 2015)

3. Media

Pemerintah memonitor media dan menggencarkan pelarangan pada informasi yang dikategorikan sebagai "*anti-establishment*" Akses terbuka padamedia online dilarang termasuk diantaranya *The Gambia Echo* dan *Freedom Newspapers*. Pada tahun 2012 stasiun radio Teraga ditutup dan pada tahun 2013 *Daily News* dan *The Standard* dipaksa untuk tutup (Freedom House, 2013)

Pada tahun 1990 ketika media sangat di dikte oleh persetujuan pemerintah atas '*standards of acceptability*' dan mempertimbangkan pentingnya posisi pemerintah terhadap FGM dalam pembuatan program dan publikasinya. Wakil presiden

mengindikasikan pemerintah untuk ‘*discourage such harmful practices*’ (28 Too Many, 2015). Ketika media (terutama stasiun radio) dilarang secara terbuka untuk mendiskusikan masalah yang terkait kesehatan dari FGM dan menyampaikan pesan-pesan advokasi yang melawan praktik tersebut (28 Too Many, 2015). Walaupun pelarangan ini secara perlahan diangkat, bukti tetap mengindikasikan bahwa NGO menggunakan media untuk advokasi guna melawan praktik yang masih memiliki larangan. Stasiun radio di Gambia masih secara terbatas membahas FGM secara eksplisit.

D. Target Advokasi yang Dilakukan oleh GAMCOTRAP

Fokus dari advokasi yang dilakukan oleh GAMCOTRAP dalam tingkatan masyarakat sangat beragam mulai dari wanita, pria, pemimpin saran lokal, pemuka agama dan kaula muda. Dalam tingkat kebijakan target dari advokasi yang dilakukan adalah majelis nasional dan agen-agen pemaksa keputusan hukum termasuk juga diantaranya institusi pendidikan dan juga pergerakan masyarakat secara umum.

GAMCOTRAP melakukan usaha pelobian kepada kelompok Nasional yang telah terpilih sejak 2005. Dengan hasil dari konsultasi yang terjadi adalah adanya konsensus bahwa FGM akhirnya dianggap sebagai tindakan kriminal namun pada akhirnya kongres nasional dianggap tidak memberikan perhatian yang tepat dalam pengusulan draft yang akan dibawa ke kongres nasional untuk di pertimbangkan. Sebagai alternatif pada Mei 2015, GAMCOTRAP merencanakan perundingan nasional lainnya dengan para pemimpin dan konselor wanita nasional untuk menyampaikan penetapan hukum yang dapat melarang FGM. Dikarenakan sudah banyak kesadaran terhadap FGM yang diciptakan, ini saatnya untuk memperkuatnya dengan hukum yang melarang adanya FGM. Dikarenakan pemerintah belum menyetujui dan mempublikasikan rencana negara untuk mempercepat pengabaian terhadap FGM pada tahun 2015-2017. Salah satu strategi GAMCOTRAP adalah melalui kerjasama dengan pemimpin masyarakat yang dapat mempengaruhi parlemen melalui strategi politik seperti pada saat musim pemilihan. Selama masa percobaan tersebut, GAMCOTRAP mendapatkan respon yang positif sebanyak 10,791 orang diantara tahun 2011-2013 setuju atas deklarasi publik tersebut.

Gambia yang memiliki jaringan luas akan NGO termasuk GAMCOTRAP yang bekerjasama dengan UNJP, kementerian pemerintah dan *National Steering Committee* untuk mengakhiri praktik FGM. NGO dan masyarakat sipil telah melakukan upaya untuk

menyebarkan konten Undang-Undang Anti-FGM sejak awal termasuk melewati berbagai program sensitisasi dan terjemahan ke dalam bahasa lokal. Meskipun pada awalnya undang-undang baru tersebut membawa perdebatan di banyak komunitas dikarenakan subjeknya yang sangat tabu, pelarangan atas tindakan FGM juga mendapatkan banyak tentangan dari mereka yang percaya bahwa hal tersebut harus terus berlanjut berdasarkan tradisi dan agama. Para aktivis sangat mendukung dengan diperkenalkannya *Women's (Amendment) Act 2015* oleh presiden sebelumnya yaitu Yahya Jammeh (28 Too Many, 2018).

LIKA-LIKU PEMBEBASAN MASYARAKAT GAMBIA DARI LINGKARAN SETAN FGM

Dikarenakan FGM adalah bagian dari norma sosial masyarakat Gambia dan merupakan kultur yang sudah mendarah daging pula bagi masyarakat Gambia, sehingga menjadikan hal tersebut tolak ukur dan stigma di dalam masyarakat mereka sendiri, jika keluarga menyimpang dari norma yang berlaku maka keluarga tersebut akan dianggap menyimpang dan kemudian akan dikucilkan dari masyarakat. Hal ini juga dilihat sebagai jembatan menuju kedewasaan bagi anak perempuan melalui proses ini juga adanya penanaman nilai-nilai hirarki sosial dimana perempuan akan belajar untuk menghormati pola-pola dan aturan dari interaksi yang harus dijaga antara wanita dan komunitas mereka. Dibudaya dimana kebersihan sangat dijunjung tinggi banyak yang percaya bahwa dengan melakukan FGM pada perempuan dapat meningkatkan kebersihan wanita itu serta dengan menghilangkan klitoris dianggap dapat mengendalikan hawa nafsu si wanita dan dapat menjaga kesucian mereka.

Jika dilihat dari perspektif lain mengapa FGM tetap terjadi di Gambia dikarenakan 48.4% dari penduduk Gambia tercatat pada tahun 2010 hidup dibawah garis kemiskinan sehingga berdampak besar pada akses masyarakatnya di sektor kesehatan dan tingkat FGM tertinggi terjadi di daerah Rural Communities dimana akses kesehatan disini juga sangat terbatas, rumit dan mahal. Menjadi penyunat dapat menghasilkan sekitar GMD 50 sampai GMD 200 per anak belum termasuk barang-barang lainnya seperti 1 kantong beras dan pakaian (Llyod-Robert, 2013). Walaupun penyunat sudah mendeklarasikan pengabaianya terhadap praktik ini namun ada beberapa dari mereka tetap menjalankannya secara diam-diam. Ketimpangan gender juga menjadi penyebab mengapa FGM masih meraja rela di Gambia sehingga wanita masih sering mengalami diskriminasi, menurut *Social Institution and Gender Index (SIGI)* Gambia menempati posisi ke 76 dari 86 negara dengan nilai 0.39

(Social Institutions and Gender Index, 2014). Untuk membantu meningkatkan kesetaraan gender pemerintah kemudian membuat *Gender Policy 2010-2020*. Kebijakan ini juga didukung juga atas berlakunya *Women's Act 2012* yang di peruntukkan untuk mengatasi kekurangan dari konstitusi terkait diskriminasi gender. Mekanismenya telah diatur sedemikian rupa oleh *Sexual Offences Bill 2013* dan *Domestic Violence Bill 2013*. *The Women's Act* adalah dokumen yang maju secara bertahap dan pertama di Afrika yang mewakili komitmen yang jujur dan positif dari pihak konstitusi terhadap hak-hak wanita (Women's Bureau/UNDP, 2014).

Selain melalui bentuk legal dalam mempengaruhi kebijakan yang diperuntukkan untuk melarang FGM, GAMCOTRAP juga melakukan advokasi melalui media dengan mengadakan pelatihan bagi para awak media guna mendidik bagaimana cara menginvestigasi dan melaporkan isu terkait FGM. Selain melakukan kegiatan-kegiatan diatas, GAMCOTRAP kemudian juga menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi para penyunat dan bagi penyunat wanita akan menerima pelatihan dalam bidang bisnis dan wirausaha dan dihadiahi jaminan pinjaman mikro (28 Too Many, 2015).

Dukungan juga berasal dari anak-anak muda di Gambia yang membawa masalah ini ke Twitter dan *blogging* untuk memperkuat kampanye dan jaringan guna memperluas gerakan yang mendukung diakhirinya FGM. Sedangkan untunk menjangkau masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah di daerah pedesaan media masa utama yang digunakan adalah radio dengan beragam bahasa (The Girl Generation, 2016).

The UN Trust Fund menyokong sebuah program 2 tahunan bernama "*Advancing Women's Rights and Ending Harmful Traditional Practice through Rights Education*" oleh GAMCOTRAP, pada kesempatan kali ini Isou Touray juga mengatakan : "*We've been gaining momentum right across the country where we build capacity, create awareness, raise the consciousness of the people*" (UNTF, 2018).

Program ini dimulai pada tahun 2015-2017 yang melibatkan pelatihan komunitas dan seminar guna menguatkan perempuan untuk mendeklarasikan hak mereka dan anak-anak perempuan mereka. Pelatihan ini juga memfokuskan kepada wanita yang berasal dari latar belakang yang sama dan cenderung memilih untuk mengabaikan FGM. Hasil dari pelatihan ini ada sekitar lebih dari 300 perempuan yang telah mengambil peran dan 64% ibu muda yang telah hadir di sesi pelatihan tersebut (UNTF, 2016). Selain kegiatan tersebut banyak hal yang telah dilakukan oleh GAMCOTRAP seperti ikut andil dalam pembuatan keputusan,

advokasi melalui media dengan melatih personil tentang bagaimana menginvestigasi dan melaporkan isu-isu terkait dengan FGM (28 Too Many, 2015)

Pada tahun 2014 diadakannya Forum Nasional Pemuda pertama dengan mengambil Tema “Youth and FGM: Ending an Age-Old Tradition in A Generation” di Paradise Suites Hotel. Adalah hasil kerjasama dari *Think Young Women* dan *Safe Hands for Girls* dengan *National Youth Council (NYC)*, *Action Aid International-The Gambia*, *Equality Now*, *TOSTAN*, *Wassu Gambia Kafo*, *GAMCOTRAP*, *UNFPA* dan *UNICEF*; dengan dukungan dari *The Guardian Newspaper* dan *The Girl Generation*. Tujuan dari forum pemuda ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan efek yang ditimbulkan dari praktik FGM, untuk mengembangkan materi mengenai advokasi untuk melawan praktik FGM, untuk mendokumentasikan dan membagikan pemikiran dan suara dari kaula muda terkait masalah FGM serta untuk mempengaruhi pembuat keputusan serta mendorong penggunaan kreativitas sebagai sarana untuk mengatasi masalah FGM. Objek spesifik dari forum ini adalah untuk memberdayakan dan mendorong 100 anak muda untuk menggunakan seni kreatif sebagai sarana untuk mempercepat penghapusan FGM/C serta melatih setidaknya 50 anak muda untuk menjadi orang yang penting di dalam komunitas mereka sehingga mereka akan terlibat secara aktif dalam Kampanye Anti-FGM (*Think Young Women & Safe Hands for Girls*, 2014).

Hingga pada tahun 2015 akhirnya Presiden Gambia yaitu Yahya Jammeh mengumumkan bahwa Gambia telah mengilegalkan FGM di negaranya. Keputusan yang diambil Yahya Jammeh tidak terlepas dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh NGO dan aktivis-aktivis yang gencar menyuarakan masalah ini seperti Jaha Dukureh yang melakukan kampanye di negara tersebut di dukung oleh the Guardian, menghabiskan beberapa minggu belakangan untuk rapat dengan menteri kabinet dan mengirimkan artikel-artikel dari koran guna menginformasikan mereka tentang isu ini (Lyons, 2015). Pelarangan oleh presiden ini juga ditanggap positif oleh masyarakat karena dapat membantu mengurangi secara signifikan praktik ini untuk terjadi di Gambia dengan pelarangan ini juga kemudian adanya amandemen dari *Women's Act 2010*, sebagai bentuk sah dari pelarangan ini di Gambia (*The Girl Generation*, 2016).

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menghilangkan tradisi yang sudah mendarah daging yang merugikan seperti FGM, dukungan tidak datang hanya dari pemerintah, namun juga dari NGOs dan masyarakat yang ikut mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah maupun NGO. Disini NGO yang berfokus pada usaha-usaha untuk ditinggalkannya praktik yang merugikan ini adalah *The Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* (GAMCOTRAP) yang didirikan pada tahun 1984 sebagai NGO pertama yang terlibat secara langsung dengan kampanye anti-FGM. GAMCOTRAP bergerak di bidang advokasi dan penciptaan kesadaran di sekitar mengenai isu FGM selain itu GAMCOTRAP juga mempromosikan tentang perlindungan wanita dan anak perempuan dalam hak-hak politik, sosial, seksual, kesehatan reproduksi dan pendidikan anak-anak.

FGM yang terjadi di Gambia melibatkan lebih dari 75% dari wanita disana, tingkat FGM berbeda sesuai kelompok etnis yang ada dengan persentase yang paling tinggi dilakukan oleh kelompok etnis Serahule yaitu sebesar 97.8% dan yang paling rendah dilakukan oleh kelompok etnis Wolof yaitu sebesar 12.4%.

Keterlibatan NGO lokal yang bekerjasama dengan NGO internasional dapat memperkuat jaringan advokasi yang dimiliki oleh NGO lokal sehingga secara tidak langsung akan memberikan *power* dan *influence* yang lebih untuk melobby. Pergerakan dari media juga dapat membantu NGO untuk menggaet lebih banyak perhatian terkait isu ini. Selain memperkuat dan mengamandemen peraturan yang ada untuk bisa mengilegalkan FGM, memberdayakan masyarakat dan menyebarkan pengetahuan terkait isu FGM kepada masyarakat juga merupakan langkah penting guna menghindari kejadian ini tetap berlanjut walaupun sudah dilarang.

Berbagai pendekatan juga telah dilakukan untuk mengurangi kasus FGM yang ada di Gambia, seperti menyediakan mata pencaharian lain bagi para penyunat, mengajak kaum pria untuk ikut melawan terkait masalah FGM dan memberi pengetahuan mengenai konsekuensi kesehatan yang akan diterima oleh para korban FGM. Hambatan dalam usaha GAMCOTRAP ini juga berasal dari sektor pendidikan, agama dan media.

FGM sulit dilepaskan dan dihentikan dikarenakan dianggap sebagai budaya yang mendarah daging serta budaya yang menghormati tetua di dalam masyarakat yang telah melekat di kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dijadikan sebagai tolak ukur penerimaan

wanita dan keluarganya di masyarakat. Program yang dicanangkan oleh GAMCOTRAP lebih banyak berfokus untuk memberdayakan generasi muda baik pria dan wanita untuk mengerti bahaya dari praktik dan mendorong para wanita untuk dapat merebut hak mereka, sehingga hal tidak akan terulang di kemudian hari.

REFERENCE

- 28 Too Many. (2015). *FGM In The Gambia*. 68-69.
- 28 Too Many. (2018). *The Gambia: The Law and FGM*. 28 Too Many.
- Access Gambia. (t.thn.). *Gambian Culture, Traditions & Society*. Diambil kembali dari [acesgambia.com: http://www.accessgambia.com/information/culture-traditions.html](http://www.accessgambia.com/information/culture-traditions.html)
- As'ad, A. S. (2014, Maret 16). *LSM dan Potret Buram Gerakan Civil Society*. Diambil kembali dari Kompasiana: http://www.kompasiana.com/bangsalamonly.blogspot.com/lsm-dan-potret-buram-gerakan-civilsociety_54f80f8ba3331163648b48cf
- BBC. (2018, February 14). *The Gambia Country Profile*. Diambil kembali dari BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-africa-13376517>
- BBC News Indonesia. (2016, February 5). *200 Juta Anak dan Dewasa Mengalami Sunat Perempuan di 30 Negara*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160205_dunia_unicef_sunat_perempuan
- Berg, R. C., Denison, E., & Fretheim, A. (2010). Psychological, social and sexual consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C): a systematic review of quantitative studies. 77.
- Burke, A. (2002). *Lonely Planet: The Gambia and Senegal*. Australia: Lonely Planet Publications.
- CPIN. (2016). Country Policy and Information Note Gambia : Female Genital Mutilation (FGM). 9.
- Drammeh, O. (2014). *Krio Muslims: The Legacy of Aku Marabout Culture*.
- Equality Now. (2016). *Where does Female Genital Mutilation Occur*. Diambil kembali dari equality now: https://www.equalitynow.org/what_is_FGM/
- Fakih, M. (1991). *NGOs In Indonesia. Occasional Paper Series on Non-governmental Organization*.

- FGM National Group. (2015). *Historical & Cultural*. Diambil kembali dari FGM National Group: http://www.fgmnationalgroup.org/historical_and_cultural.htm
- Freedom House. (2013). *Freedom in the World 2013*. Diambil kembali dari [freedomhouse.org: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/gambia#.VOsroy6pJ25](https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/gambia#.VOsroy6pJ25)
- GAMCOTRAP. (1999). *Best Practices Dealing with Traditional Practices in The Gambia*.
- GAMCOTRAP. (1999). *Report of a Participatory Rapid Appraisal by Community-based Facilitators*. Banjul: GAMCOTRAP.
- GAMCOTRAP. (2016). *GAMCOTRAP Historical Development*. Diambil kembali dari GAMCOTRAP: <http://www.gamcotrap.gm/index.php/organisational-profile/historical-development>
- GAMCOTRAP. (2016). *The Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children: Organization Profile*.
- GOTG. (1995). *The Gambia's National Report on Women for the Beijing Fourth World Conference and Beyond*. Beijing.
- Handayani, Y. (2016). *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*. 1-9.
- Hedley, R., & Dorkenoo, E. (1992). *Child Protection and Female Genital Mutilation*. London: FORWARD.
- Hoover, J. (2015, December 21). *Dropping The Knife in The Gambia*. Diambil kembali dari 28 Too Many: <https://www.28toomany.org/blog/dropping-the-knife-in-the-gambia-guest-blog-by-jacqueline-hoover/>
- IAC. (t.thn.). *FGM*. Diambil kembali dari [iac-ciaf.net: http://www.iac-ciaf.net/fgm/](http://www.iac-ciaf.net)
- Idowu, A. A. (2008). Effects of Female Genital-Mutilation on Human Rights of Women and Female Children: The Nigerian Situation. *Research Journal of International Studies*, 22-23.
- Inter-Parliamentary Union. (2017). *Legislation and other national province*. Diambil kembali dari IPU: <http://archive.ipu.org/wmn-e/fgm-prov-g.htm>
- Jaiteh, M. S., & Saho, A. (2006). *The Gambia: Atlas of 2003 Population and Housing Census*. Banjul, Gambia: The Gambia Bureau of Statistics.
- Jallow, A. (2014, December 24). *Gambia to Waive School Fees 'For All Students' By 2020 - Jammeh Declares*. Diambil kembali dari All Africa.com: <https://allafrica.com/stories/201412290459.html>
- Kaplan, A. (1998). *Senegambia to Catalonia: acculturation and social integration process. X Award Dr.Rogeli Duocastella in Social Science*.

- Kaplan, A., Cham, B., Njie, L. A., Seixas, A., Blanco, S., & Utzet, M. (2013, June 16). *Research Article Female Genital Mutilation/Cutting: The Secret World of Women as Seen by Men*. Diambil kembali dari Hindawi Publishing Corporation: www.mgf.uab.cat/esp/scientific_publications/secret_world.pdf?iframe=true&width=100%25&height=100%25
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*.
- Kishore, D. L. (2016, February 05). *Harmful practice of Female Genital mutilation is a global concern : UNICEF*. Diambil kembali dari Merinews: <http://www.merineews.com/article/harmful-practice-of-female-genital-mutilation-is-a-global-concern-unicef/15913406.shtml>
- Kontoyannis, M., & Katsetos, C. (2010). Female Genital Mutilation. *Health Science Journal*, 04(Edisi Issue 01), 31.
- Korten, D. (1987). Third Generation NGOs Strategies; A Key to People Centered Development. *World Development Supplement*, 15, 145-159.
- Korten, D. C. (1990). *Getting To the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. West Hartford (CT): Kumarian Press.
- Levinson, D. (1998). *Ethnic Groups Worldwide*. Arizona: Oryx Press.
- Llyod-Robert, S. (2013, September 3). *Gambia women fleeing female genital mutilation threat*. Diambil kembali dari BBC News: <http://www.bbc.com/news/uk-23933437>
- Lyons, K. (2015, November 24). *The Gambia bans female genital mutilation*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://amp.theguardian.com/society/2015/nov/21/the-gambia-bans-female-genital-mutilation>
- Mackie, G. (1996). Ending Footbinding and Infibulation: A Convention Account. *American Sociological Review*, 61, 999-1017.
- Make Every Woman Count. (2013, April 17). *Violence Against Women Gambia: 30 Circumsiers Drop Knife in CRR*. Diambil kembali dari Make Every Woman Count: <http://www.makeeverywomancount.org/index.php/gender-issues/violence-against-women/5532-gambia-30-circumsiers-drop-knife-in-crr>
- Marlinda Oktavia, E. R. (2012). Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Review*, Volume I, Nomor 4.
- MICS. (2010). *The Gambia: Multiple Indicator Cluster Survey 2010: Final Report*.

- Morison, L., Scherf, C., Ekpo, G., Panie, K., West, B., Coleman, R., & Walvaren, G. (2001). The Longterm reproductive health consequences of female genital cutting in rural Gambia: a Community –based Survey. *Tropical Medicine & International Health*, 6(8).
- Mosaica. (2012). *The NGO Hand Book*. United States of America: Bureau of International Information Programs United States Department of State.
- National Women’s Bureau Office of the Vice President. (2002). *Female Genital Mutilation in Gambia*. Banjul: National Women's Bureau.
- Odukogbe, A.-T. A., Afolabi, B., Bello, O. O., & Adeyanju, A. S. (2017, April 2). Female Genital Mutilation/cutting in Africa. *Translational Andrology and Urology*, 140. Diambil kembali dari NCBI: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5422681/>
- Office of the Senior Coordinator for International Women's Issue. (2001). *The Gambia: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genital Cutting (FGC)*. United States: United States Department of State. Diambil kembali dari <https://www.refworld.org/docid/46d5787732.html>
- Plan International. (2018, January 19). *Female Genital Mutilation*. Diambil kembali dari Plan International: <https://plan-international.org/sexual-health/fgm-female-genital-mutilation/>
- Reporters Without Borders. (2013). *World Press Freedom Index 2013*. Diambil kembali dari [rsf.org: https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-2013](https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-2013)
- Sallah, A. R. (2013, April 03). *Gambia: NGOs Are Key Development Partners to Government-Says ED*. Diambil kembali dari [allafrica.com: https://www.allafrica.com/stories/201304081186.html](https://www.allafrica.com/stories/201304081186.html)
- Social Institutions and Gender Index. (2014). *Country Profile: Gambia*. Diambil kembali dari Social Institutions and Gender Index: <https://genderindex.org>
- Sommer, J. G. (1977). *Beyond Charity: U.S Voluntary Aid for Changing World*. Washington DC: Overseas Development Council.
- The African Centre for Democracy and Human Rights Studies. (2018). *About*. Diambil kembali dari The African Centre for Democracy and Human Rights Studies: <https://www.acdhhs.org/about/>
- The Daily Observer. (2013, July 2). *Gambia: 21 Sarahuleh Communities Abandon FGM in URR*. Diambil kembali dari [allafrica.com: https://allafrica.com/stories/201307021397.html](https://allafrica.com/stories/201307021397.html)
- The Girl Generation. (2016). *FGM In the Gambia: Country Briefing*. The Girl Generation.

- The Point. (2014, October 8). *First national youth forum on FGM convened*. Diambil kembali dari thepoint.gm: <http://thepoint.gm/africa/gambia/article/first-national-youth-forum-on-fgm-convened>
- The US State Department. (2016). *2015 Human Rights Practices Report*. The US State Department.
- Think Young Women & Safe Hands for Girls. (2014). *Youth and FGM: Ending An Age-Old Tradition In A Generation*. Think Young Women & Safe Hands for Girls.
- Topping, A. (2014, October 8). *Muslim youth summit told female genital mutilation is not part of Islam*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/08/muslim-youth-summit-fgm-islam-gambia>
- UN Women. (2018). *UN Trust Fund to End Violence Against Women*. Diambil kembali dari UN Women: <http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women>
- UN Women. (2018). *UN Women*. Diambil kembali dari UN Women: <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UNESCO. (t.thn.). *Effective Literacy and Numeracy Practices Database - LitBase*. Diambil kembali dari uil.unesco.org: <https://uil.unesco.org/literacy/effective-practices-database-litbase>
- UNFPA & UNICEF. (2014). *UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change*. UNFPA;UNICEF.
- UNFPA. (2007). *Global Consultation on Female Genital Mutilation/Cutting*. New York: UNFPA.
- UNFPA. (2017, February 6). *Dropping the knife: One woman joins the fight for women's right in the Gambia*. Diambil kembali dari United Nations Population Fund: <https://www.unfpa.org/news/dropping-knife-one-woman-joins-fight-womens-rights-gambia>
- UNICEF. (2005). *Changing a Harmful Social Convention - Female Genital Mutilation. Innocenti Digest*.
- UNICEF. (2005). *Female Genital Mutilation/cutting: A Stastical Exploration 2005*. UNICEF.
- UNICEF. (2016, August). *Ending Female Genital Mutilation in the Gambia*. Diambil kembali dari UN Trust Fund: <http://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/08/ending-female-genital-mutilation-in-the-gambia>

- United Nations. (2003). *Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. New York: United Nations.
- United Nations Population Fund. (2018, February). *Female Genital Mutilation (FGM): Frequently asked questions*. Diambil kembali dari [ww.unfpa.org](http://www.unfpa.org): <http://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#sthash.ILanQT3.dpuf>.
- UNTF. (2016, August 11). *Ending Female Genital Mutilation in the Gambia*. Diambil kembali dari UN Trust Fund to End Violence against Women: <http://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/08/ending-female-genital-mutilation-in-the-gambia>
- UNTF. (2018, February 6). *A Conversation with Dr. Isatou Touray*. Diambil kembali dari UN Trust Fund to End Violence against Women: <http://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/02/a-conversation-with-dr-isatou-touray>
- Wadesango, N., Rembe, S., & Chabaya, O. (2011). Violation of Women's Rights by Harmful Traditional Practices. *Anthropologist*, 13(2), 121-129.
- Wilson, A.-M. (2013). How the methods used to eliminate foot binding in China can be employed to eradicate female genital mutilation. *Journal of Gender Studies*, 17-37.
- Winterbottom, A., Koomen, J., & Burford, G. (2009). Female Genital Cutting: Cultural Rights and Rites of Defiance in Northern Tanzania. 52, 47-71.
- Wirasenjaya, A. M. (2018). "Kedaulatan" Masyarakat Sipil Global. *Bahan Ajar "Studi NGO Internasional"*, Jurusan HI UMY 2018, 12-13.
- Women's Bureau/UNDP. (2014, June). *National Review*. Diambil kembali dari UN Women: http://www.unwomen.org/~media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/gambia_review_beijing20.ashx
- World Health Organization. (2018, January 31). *Female Genital Mutilation*. Diambil kembali dari World Health Organization: <http://www.who.int/news-room/factsheets/detail/female-genital-mutilation>